

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Upah Minimum Kabupaten

a. Pengertian upah

Upah atau gaji adalah pendapatan yang diterima oleh pekerja dari perusahaan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Besar atau kecilnya jumlah upah yang dibayarkan mengindikasikan tingkat kemakmuran bagi pekerja dan keluarganya. Jumlah upah yang diberikan sudah diatur dengan ketentuan yang tidak sama untuk antar daerah atau antar perusahaan.¹ Upah dengan jumlah kecil yang diterima oleh pekerja, mengakibatkan kecilnya penghasilan yang diterima oleh pekerja sehingga mengakibatkan banyak pekerja yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Upah dengan jumlah kecil yang diterima oleh pekerja bisa berasal dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kualitas SDM yang rendah, mengakibatkan produktivitas pekerja yang kurang maksimal. Untuk itu pemerintah perlu mengadakan program mendidik serta melatih *skill* pekerja untuk bisa memberikan produktivitas yang maksimal bagi perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat memberikan penghasilan yang besar bagi para pekerja. Apabila hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah, maka berakibat fatal bagi pekerja, karena terus-menerus hidup sengsara dalam lingkaran kemiskinan.²

b. Teori Upah

Mengenai upah terdapat beberapa teori, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1) Teori upah hukum alam

Teori upah ini disahkan berlandaskan biaya yang dibutuhkan guna menjaga tenaga pekerja tetap prima setelah melakukan pekerjaan yang terus-menerus dipakai selama masih proses bekerja. Selain itu teori upah ini

¹ D.C. Tyas, *Lebih Paham Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), 19-20.

² Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium* 10, no. 2 (2021): 122.

juga menjelaskan tentang jumlah upah yang diberikan kepada pekerja hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup pekerja, sehingga tidak jarang banyak yang menganggap bahwa teori upah ini dipakai guna memelihara pekerja agar tidak sampai kelaparan dan tenaganya bisa dipakai lagi untuk bekerja.

- 2) Teori undang-undang upah besi
Teori upah yang menjelaskan tentang pekerja yang diberi upah dengan jumlah kecil, sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pernyataan tersebut yang dirasa kurang bisa berpihak kepada pekerja, dan jika pekerja ingin mendapatkan kesejahteraan hidup pekerja mempunyai hak untuk menentang majikan apabila sang majikan terbukti semena-mena.
- 3) Teori persediaan upah atau teori dana upah
Teori yang menerangkan tentang pembayaran upah yang dananya sudah tersedia dan dijadikan uang muka bagi pekerja. Jika dana upah dibagi jumlah pekerja, maka menghasilkan upah rata-rata pekerja. Upah rata-rata ini akan naik bilamana dana upah naik ataupun jumlah pekerja menurun.
- 4) Teori upah etika
Yaitu teori yang menerangkan upah itu harus juga ditinjau dari sudut etika, yang mana harus menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja maupun keluarganya.
- 5) Teori upah sosial
Teori ini dilakukan di negara sosialis, yang menganggap upah tidak lagi merujuk pada hasil pekerjaan melainkan hanya pada kebutuhan pekerja.³

c. Sistem Upah

Berdasarkan ditetapkannya upah, terdapat beberapa sistem pengupahan yang digunakan:

- 1) Sistem upah jangka waktu yaitu, ditetapkannya upah berdasarkan jangka waktu karyawan bekerja. Seperti upah per jam, upah harian, upah mingguan dan upah bulanan.

³ Mawardi Khairi, dkk., *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 42-43.

- 2) Sistem upah potongan yaitu, sistem upah yang memotong gaji karyawan, seperti karena kurang maksimalnya hasil kerja karyawan.
- 3) Sistem upah permufakatan yaitu, upah yang diberikan kepada karyawan tetapi bukan perorangan melainkan kepada sekumpulan karyawan yang secara bersama-sama melakukan pekerjaan.
- 4) Sistem skala upah berubah yaitu, upah yang ada hubungannya dengan hasil *profit* perusahaan. Upah akan naik atau turun sesuai naik turunnya hasil *profit* perusahaan.
- 5) Upah indeks yaitu naik turunnya upah berdasarkan naik turunnya angka indeks kehidupan.
- 6) Sistem pemberian *profit*, yaitu pada penghujung tahun apabila perusahaan memiliki *profit* lebih maka sebagian dari *profit* akan diberikan kepada karyawan.⁴

d. Jenis-Jenis Upah

Menurut Imam Soepomo, dalam Mawardi dkk, mengidentifikasi upah berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan nilainya, upah diklasifikasikan menjadi upah nominal dan upah rill. Upah nominal adalah jumlah besarnya uang sedangkan upah rill merupakan banyaknya barang yang bisa didapatkan dengan jumlah besarnya uang itu.
- 2) Berdasarkan bentuknya, upah dapat diklasifikasikan menjadi upah berupa uang dan upah berupa barang. Upah berupa uang merupakan upah yang dibayarkan berupa uang dengan mata yang berlaku di Indonesia sedangkan upah berupa barang dapat berupa makanan, kendaraan, pengobatan dan sebagainya.⁵

e. Upah Minimum

Menurut Natasha dan Dewi dalam Dede Edwin dan Made Kembar upah minimum adalah suatu standar minimum yang dipakai oleh para pengusaha atau si pemberi kerja dalam hal pemberian upah pada pekerja. Upah yang diberikan dapat ditunaikan dalam wujud uang sebagai balas jasa dari pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja,

⁴ Mawardi Khairi, dkk., *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, 40-41.

⁵ Mawardi khairi, dkk., *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, 39-40.

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan untuk pekerja serta keluarganya, atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.⁶ Upah minimum ditetapkan karena mempunyai tujuan guna menjamin pekerja untuk bisa memperoleh pendapatan agar bisa hidup secara layak, agar pekerja memperoleh kemakmuran, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang jauh diantara masyarakat.⁷ Dalam penetapannya upah minimum dilandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan juga mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁸ Selain itu adanya pengesahan terhadap kenaikan upah minimum harus juga menyeimbangkan pada kebutuhan hidup layak pekerja yang mana berarti, apabila jumlah upah minimum mengalami peningkatan, maka peningkatannya tidak boleh kurang dari standar hidup layak pekerja.⁹

Berdasarkan penelitian I Wayan Yoga dan I Wayan Wenagama, Simanjuntak dalam Gianie mengungkapkan, adanya Upah minimum merupakan suatu kebijakan dalam hal pengupahan yang sudah banyak diaplikasikan di berbagai negara. Kebijakan kenaikan upah minimum pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, pertama upah minimum merupakan alat keamanan untuk pekerja agar dapat mempertahankan nilai upah yang diberikan tidak mengalami penurunan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Kedua untuk alat keamanan bagi perusahaan untuk menjaga produktivitas hasil kerja karyawan.¹⁰

⁶ Dede Edwin Megantara dan Made Kembar Sri Budhi, "Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 9, no. 1 (2020): 97.

⁷ Ria Safitri, dkk., "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah," *IQTISHODUNA* 16, no. 1 (2020): 46.

⁸ Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35.

⁹ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," 122.

¹⁰ I Wayan Yoga Andika Putra, dan I Wayan Wenagama, "PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM PROVINSI BALI TAHUN 2015-2019," *E-Jurnal EP Unud* 10, no. 11 (2021): 4512.

Upah minimum kabupaten (UMK) merupakan komponen dari penghasilan karyawan yang bertempat tinggal di suatu kabupaten sehingga tingkat upah merupakan salah satu acuan yang bisa menggambarkan kemakmuran masyarakat. Apabila upah minimum kabupaten mengalami peningkatan maka kebutuhan hidup layak di kabupaten tersebut juga mengalami peningkatan, dan nantinya standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Dari standar hidup layak yang terpenuhi berakibat pada masyarakat yang terbebas dari kemiskinan.¹¹ Dalam penetapannya upah minimum kabupaten dilaksanakan oleh Gubernur atas anjuran dari Dewan Pengupahan Provinsi serta anjuran dari Bupati/Walikota. Anjuran tersebut diutarakan kepada Gubernur dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati/Walikota, lewat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi yang bertugas dibidang ketenagakerjaan. Anjuran dari Bupati/Walikota berawal dari rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi apabila telah terwujud.¹²

f. Upah Minimum dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan mengenai imbalan atau upah yang sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan memperhatikan pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, dan diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah: 105).

¹¹ I Wayan Yoga Andika dan I Wayan Wenagama, "PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM PROVINSI BALI TAHUN 2015-2019," 4512.

¹² Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, 36.

Dalam ayat diatas, menjelaskan tentang perintah Allah untuk bekerja dan jaminan balasan dari Allah atas apa yang telah kita lakukan. Selain itu Allah tidak akan bersikap dzalim dengan menya-nyikan pekerjaan dari hambanya, tanpa memberikan jaminan balasan yang adil atas amal yang dikerjakan oleh hambanya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 30.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ

أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Sesungguhnya mereka yang beriman serta beramal baik dan tentulah kami pasti tidak pernah menya-nyikan pahala (balasan) orang-orang yang melaksanakan amalan(nya) dengan baik. (Q.S Al-kahfi: 30).

Islam juga membahas mengenai dasar penentuan upah. Ditentukannya upah berdasarkan dengan jenis pekerjaannya. Sebagaimana ketentuan yang telah Allah jelaskan dalam surat Al-Aqhaf ayat 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يظَلَمُونَ

﴿١٩﴾

Artinya: Dan untuk masing-masing mereka derajat menurut apa yang mereka telah kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka imbalan (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. (Q.S Al-Aqhaf ayat 19).

Dari ayat-ayat diatas dapat diperoleh pengertian upah merupakan suatu imbalan yang diperoleh seseorang atas pekerjaannya yang berupa imbalan materi (dunia) dan juga berupa imbalan ganjaran (akhirat) secara adil dan pantas.¹³

¹³ Wiwin Agustian dan Dina Mellita, "Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 3, no. 1 (2020): 41.

2. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator yang bisa diperhatikan guna mengetahui kualitas manusia dan skala ekonomi adalah indeks pembangunan manusia (IPM).¹⁴ IPM merupakan salah satu indikator yang bisa diaplikasikan guna mengevaluasi kualitas pembangunan manusia, baik dari segi efeknya terhadap keadaan fisik manusia (kesehatan dan kemakmuran) ataupun dari segi non fisik seperti pengetahuan. Indeks pembangunan manusia pertama kali dipopulerkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dan diumumkan secara periodik pada laporan tahunan. IPM disusun oleh tiga dimensi dasar seperti, umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM dapat dikatakan sebagai ukuran guna memperhatikan efek kinerja pembangunan daerah, karena memperhatikan kualitas penduduk pada suatu daerah mengenai harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pelaksanaan pembangunan, IPM juga berguna untuk menyumbangkan pedoman dalam penentuan kebijakan mana yang dianggap sebagai prioritas dalam pembangunan yang dapat ditangani terlebih dahulu. Selain itu IPM juga dijadikan alat ukur dalam pembangunan manusia guna menangani permasalahan kemiskinan.¹⁵

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang dipakai guna mengukur keberhasilan suatu negara atau daerah dalam tiga hal yang melandasi pembangunan manusia seperti, lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup. IPM mempunyai kisaran nilai indeks antara 0-100. IPM menghitung keberhasilan suatu negara atau daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia seperti, lamanya hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Ketiganya dihitung dengan tingkat harapan hidup, keberhasilan pendidikan dan

¹⁴ Jahtu Widya Ningrum, dkk., “Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 212.

¹⁵ Nadya Agustin, dkk., “Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin,” *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 8, no. 1 (2019): 55.

pengeluaran perkapita. Apabila IPM hanya dilihat dari pengeluaran perkapita saja, menandakan hanya memperhatikan peningkatan status ekonomi suatu daerah berlandaskan pendapatan per tahun. Namun jika memperhatikan juga dari sisi kesehatan dan pendidikan, maka kualitas IPM akan terlihat lebih sempurna karena juga memperhatikan unsur terpenting dalam hal pembangunan manusia. Dengan kata lain dapat dikatakan semakin banyak komponen IPM yang terpenuhi nantinya akan menghasilkan dampak positif bagi kemakmuran serta kesejahteraan bagi penduduk.¹⁶

b. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2010 UNDP melaksanakan perbaikan, dengan tetap memakai tiga dimensi yang sama seperti dahulu hanya indikatornya yang diganti. Digantinya indikator dalam IPM, dianggap indikator yang dahulu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Dimensi IPM yang tetap digunakan seperti, umur panjang dan hidup sehat, pendidikan serta standar hidup layak. Adapun indikator yang mengalami perbaikan seperti, angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan produk nasional bruto (PNB) perkapita. Berdasarkan perkiraan dan rumus dari BPS dan UNDP menyatakan bahwa IPM ditetapkan dan dirangkai dari beberapa komponen berikut, yaitu:

- 1) Lamanya hidup yang dihitung dengan harapan hidup saat lahir.
- 2) Tingkat pendidikan, dihitung dengan serangkaian antara angka melek huruf, pada masyarakat dewasa.
- 3) Tingkat kehidupan layak, dihitung dengan pengeluaran perkapita yang telah diseimbangkan dengan (*purchasing power parity*) atau daya beli perkapita dalam rupiah.¹⁷

Indeks pembangunan manusia merupakan rata-rata sederhana dari tiga komponen dasar diatas, IPM dalam wujud lain dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{indeks } X3)$$

¹⁶ Farathika Putri Utami, "Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomika* 4, no. 2 (2020): 103.

¹⁷ Farathika Putri Utami, "Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh," 103-104.

Dimana:

X1 = lamanya hidup

X2 = tingkat pendidikan

X3 = tingkat kehidupan layak (daya beli)

Terdapat tiga kelompok peringkat dalam indeks pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM yaitu:

IPM < 50 dikatakan rendah.

50 < IPM < 80 dikelompokkan sedang atau menengah.

IPM ≥ 80 digolongkan tinggi.¹⁸

c. Pembangunan Manusia Dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan tentang manusia yang dijadikan khalifah dimuka bumi, seperti yang tertuang dalam Qs. Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata: “mengapa Engkau akan menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan saling menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau?” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah: 30).

Dipilihnya manusia menjadi khalifah di bumi oleh Allah, karena manusia dari lahir telah dibekali Allah dengan fasilitas organ tubuh yang lengkap berikut dengan potensi yang apabila dimaksimalkan akan menjadi sumber daya

¹⁸ Jahtu Widya Ningrum, dkk., “Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam,” 213.

manusia yang berpotensi unggul dan menyadari akan tanggung jawab yang akan diembannya untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah dimuka bumi ini.¹⁹ Khalifah sebagai wakil Allah dan pemimpin di bumi, memiliki tugas dalam memakmurkan bumi. Tugas memakmurkan bumi telah tertuang dalam QS. Hud ayat 61.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Allah. Allah telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan engkau sebagai pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) serta mengabulkan (doa hamba-Nya)”. (Q.S Hud: 61).

Memakmurkan bumi memiliki arti mengenai pembangunan. Kaitannya dengan manusia, jelas manusia memiliki peran dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) dapat dikatakan sebagai modal dalam pembangunan. Sehingga akan lebih baik jika kualitas SDM bisa terus dilatih agar mempunyai SDM yang berkualitas unggul. Sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang berlimpah tetapi tanpa dukungan SDM yang berkompeten, maka negara tersebut tidak langsung bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan SDM yang dimiliki belum mengerti cara memanfaatkan SDA dengan benar. Namun sebaliknya suatu negara yang tidak kaya akan SDA namun mempunyai SDM

¹⁹ Bukhari, “Islam Dan Pembangunan Manusia Di Era Globalisasi ” *Waratsah: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Sosiolinguistik* 4, no. 2 (2018): 113.

yang berkualitas unggul, akan lebih mudah berproses dibandingkan dengan negara yang mempunyai SDA berlimpah tanpa dukungan dari SDM yang berkompeten. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya manusia mempunyai dua peran dalam pembangunan, pertama sebagai objek dan kedua sebagai subjek dalam pembangunan. Sebagai objek pembangunan artinya sebagai tujuan dalam memperoleh kemakmuran. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, manusia bertugas dengan memiliki peran untuk memperoleh kesejahteraan.²⁰

Dalam pelaksanaan pembangunan manusia, dapat diusahakan dengan memaksimalkan akses pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut karena dengan pendidikan yang baik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima dan mempelajari teknologi modern sehingga dalam suatu negara dengan mudah akan memperoleh pertumbuhan pembangunan yang terus berkelanjutan.²¹ Dalam ajaran Islam pendidikan terlalu banyak disorot salah satunya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ
فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan didalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah hendak memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah hendak mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

²⁰ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 176.

²¹ Westi Riani, “Pembangunan Pendidikan Sebagai Motor Penggerak IPM Jawa Barat.” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 22, no. 3 (2006): 284.

Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. (Q.S Al-Mujadalah: 11).

Begitu juga dengan kesehatan yang juga mendapat peran dalam pembangunan manusia. Kodrat manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah dan untuk beribadah kepada-Nya, keduanya tidak dapat terwujud dengan maksimal tanpa didukung dengan kesehatan yang prima bagi para manusianya. Dalam ajaran Islam menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi umat Islam dan hal tersebut telah banyak dibahas salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya: Diharamkan bagimu (makan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) yang disembelih selain atas (nama) Allah, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, melainkan yang bisa kamu sembelih terlebih dulu. (Q.S Al-Maidah: 3).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa larangan dalam mengonsumsi makanan yang diharamkan bukan suatu alasan, melainkan makan makanan yang diharamkan yang saat ini dapat dibuktikan dengan penelitian-penelitian dalam ilmu pengetahuan ternyata dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi kesehatan bahkan dapat memberikan penyakit yang dapat merusak dan membahayakan bagi kesehatan manusia.²²

3. Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Secara harfiah, miskin itu berarti tidak memiliki harta. Miskin juga berarti tidak mempunyai daya dalam menyeimbangkan standar kebutuhan hidup dengan

²² Mia Fitriah Elkarimah, "Kajian al-Qur'an dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* XV, no. 1 (2016): 119.

pendapatan yang ekonominya rendah. Singkatnya kemiskinan didefinisikan sebagai suatu tingkat standar hidup yang rendah dengan kurangnya materi yang dimiliki, bagi sekelompok orang, dibandingkan dengan tingkat standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sedangkan secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai rendahnya penghasilan yang diperoleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup pokok. Sehingga mereka yang disebut berada digaris kemiskinan, apabila tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup pokok.²³

Banyak para ahli yang mendefinisikan kemiskinan, diantaranya Kartasmita dan Narayan dalam buku Bambang Rustanto. Kartasmita mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan *problem* dalam pembangunan yang diindikasikan dengan pengangguran dan ketertinggalan yang meningkat kemudian muncul masalah ketimpangan. Sedangkan Narayan mengatakan kemiskinan diartikan tidak adanya aset, daya upaya, keberlimpangan harta, kesehatan prima, emosi, penghormatan, rasa simpati, ciri khas budaya, imajinasi, informasi, intelektualitas, rasa gemar berorganisasi dalam wadah politik dan akuntabilitas.

Dari definisi diatas menginformasikan kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, kelompok, dan keluarga untuk mencukupi standar kebutuhan hidup terendah, seperti pendidikan yang rendah, sehingga pengangguran meningkat serta banyak warga yang belum bisa mengakses program atau layanan pemerintah sehingga susah dalam mencukupi kebutuhannya.²⁴

b. Teori kemiskinan

Teori lingkaran kemiskinan yang dimiliki oleh Gunnar Mydrall dalam Novia Rahmawati dkk, menyebutkan bahwa kondisi penduduk yang miskin diawali dari pendapatan yang rendah sehingga berpengaruh pada konsumsi yang digunakan, dan nantinya berakibat pada kualitas gizi yang buruk dan selanjutnya menyebabkan kualitas kesehatan menjadi buruk juga. Kesehatan penduduk yang buruk tentu nantinya dapat

²³ Josep, *Konsep dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Indocamp, 2018), 7.

²⁴ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga menyebabkan pendapatan yang diterima juga rendah dan berujung terciptanya kemiskinan.²⁵

Menurut Kaufman dalam penelitian Sinta Ariska dkk, menyebutkan tujuan utama diputuskannya upah minimum adalah demi mencukupi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kemakmuran pekerja. Upah minimum adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk berpenghasilan kecil, terutama para pekerja yang kekurangan. Sehingga menaikkan upah minimum nantinya dapat menaikkan penghasilan penduduk, yang kemudian dapat tercipta penduduk yang makmur, sejahtera, dan sentosa sehingga dapat mengentaskan masalah kemiskinan.²⁶

Todaro dalam Kevin Dwi Prasetyo dan Zainal Arifin mengungkapkan bahwa pembangunan manusia mempunyai peran guna mewujudkan suatu negara dalam menguasai teknologi modern dan apabila terus dilatih agar terwujud pertumbuhan yang berkelanjutan. Indeks pembangunan manusia yang rendah akan menyebabkan produktivitas masyarakat rendah yang nantinya berimbas pada penghasilan yang didapat. Sehingga penghasilan yang rendah akan mengakibatkan tingkat penduduk miskin yang meningkat.²⁷

c. Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Soeharto dalam buku Bambang Rustanto menyebutkan kemiskinan mempunyai ciri ekonomi yang berarti tidak memiliki harta, tidak memiliki daya untuk mencukupi kebutuhan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya, sehingga beliau mencirikan kemiskinan seperti:

- 1) Tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar.

²⁵ Novia Rahmawati, dkk., “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional(UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia),” *Convergence: The Journal of Economic Development* 4, no. 1 (2022): 21.

²⁶ Sinta Ariska dan Sri Ulfa Sentosa. “Pengaruh inflasi, pendidikan, dan upah terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 3, no. 3 (2021): 85.

²⁷ Kevin Dwi Prasetyo dan Zainal Arifin. “Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 2 (2022): 301.

- 2) Tidak bisa bekerja karena sakit, cacat fisik atau mental.
- 3) Kurang bisa melakukan kegiatan sosial.
- 4) Sumber daya manusia yang dimiliki kurang berkompeten.
- 5) Rentan terhadap guncangan baik individu ataupun masa.
- 6) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan pekerjaan tetap.
- 7) Masa depan yang tidak ada jaminan.²⁸

d. Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai jenisnya masing-masing, seperti yang dijelaskan berikut:

- 1) Kemiskinan absolut
Berkaitan dengan pembuatan standar minimum yang diwujudkan dalam garis kemiskinan. Sehingga dengan ini akan diketahui seberapa jauh penghasilan masyarakat dengan standar minimum.
- 2) Kemiskinan relatif
Kemiskinan yang merujuk pada perbedaan relatif tingkat kemakmuran antar kelompok masyarakat.²⁹
- 3) Kemiskinan natural
Kemiskinan yang dikarenakan dari awalnya memang miskin, sebab tidak mempunyai sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya pembangunan. Kemiskinan ini terjadi karena faktor alamiah seperti cacat, sakit, manula, atau bencana alam.
- 4) Kemiskinan kultural
Kemiskinan yang merujuk pada sikap seseorang yang berasal dari gaya hidupnya. Seperti selalu merasa kekurangan dan tidak berkecukupan. Biasanya seseorang yang tergolong kemiskinan ini tidak mau diajak untuk melaksanakan perubahan, dan hal inilah yang menjadi seseorang tersebut selalu mendapat penghasilan yang rendah.
- 5) Kemiskinan struktural
Jenis kemiskinan seperti ini berasal dari kebijakan ekonomi yang tidak adil dan tatanan ekonomi yang ingin menguntungkan masyarakat atau pihak-pihak tertentu.³⁰

²⁸ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 4.

²⁹ Josep, *Konsep dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, 11-13.

e. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam M.Subari kemiskinan berarti tidak bergerak atau diam, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan dapat berasal dari sikap yang hanya diam atau enggan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mengusahakan diri terhindar dari kemiskinan. Kegiatan yang enggan bergerak tersebut, merupakan sikap yang dapat menyakiti diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki nasib dan seterusnya akan hidup dalam kesengsaraan.³¹ Hal tersebut tidak selaras dengan ajaran agama Islam yang penjelasannya telah diuraikan dalam Al Qur'an surat Ar Ro'du ayat 11.

لَهُرْ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ
 اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, didepan dan dibelakangnya, mereka memelihara atas amanah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah. (Q.S. Ar Ro'du:11).

Telah ditegaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan seseorang bilamana seseorang tersebut tidak ada keinginan untuk merubahnya. Sudah jelas bahwa jika menginginkan hal perubahan terjadi, perlu dilaksanakan tindakan usaha, ikhtiyar, dan doa seperti halnya agar terhindar dari kemiskinan. Seperti janji Allah pada Al Qur'an surat Hud ayat 6.

³⁰ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 6.

³¹ Muhammad Subari, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no.1 (2020): 28-36.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan tidak ada binatang melatapun di bumi hanya Allah-lah yang memberi rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat persembunyian binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz). (Q.S Hud: 61).

Janji Allah akan jaminan rezeki bagi setiap makhluknya sudah dijelaskan dalam ayat tersebut, sehingga dapat menegaskan arti bahwa manusia sebagai salah satu makhluk Allah, diwajibkan untuk berusaha dalam arti lain bekerja guna memperoleh rezeki dari Allah. Diwajibkannya untuk bekerja sesuai dengan perintah Allah yang telah tertuang dalam Al Qur'an surat Al-Taubah ayat 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan memperhatikan pekerjaanmu itu, dan kamu hendak dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, dan diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-taubah:105).

Sementara bagi yang sudah tidak mampu bekerja atau yang masih mampu bekerja namun belum bisa mencukupi kebutuhan, dalam Islam memberikan solusi supaya mereka diberikan zakat atau sedekah agar bisa digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.³² Dibuatnya solusi dalam

³² Shidqi Ahyani, "Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 233.

Islam untuk menanggulangi kemiskinan, tidak memberikan arti bahwa agama Islam menyukai kemiskinan, malah sebaliknya Islam sangat membenci kemiskinan. Anggapan tersebut sesuai dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib yang pernah menyuarakan tentang penderitaan kaum muslimin akibat kemiskinan. “Seandainya kemiskinan berwujud manusia niscaya akan aku bunuh”. Menurut Rahmat dalam Shidqi Ahyani ungkapan tersebut dinukil Nabil Subhi al-Thawil dalam *al Hirman wa al-Takhalufi fi Diyar al-Muslimin*.³³

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pendukung dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Moh. Nur Khaqiqi, Tsalis Syaifuddin. (2021)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Upah Terhadap Kemiskinan.	Dalam penelitian yang sudah dilaksanakan, mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan IPM dan inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Lain lagi dengan kenaikan upah yang berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pemalang.
<p>Persamaan : Penelitian ini sama menggunakan metode kuantitatif, dan juga sama menggunakan variabel upah dan Indeks pembangunan manusia untuk variabel bebas.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini tidak menggunakan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Letak perbedaan juga terlihat pada pemilihan lokasi</p>			

³³ Shidqi Ahyani, “Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran,” 216.

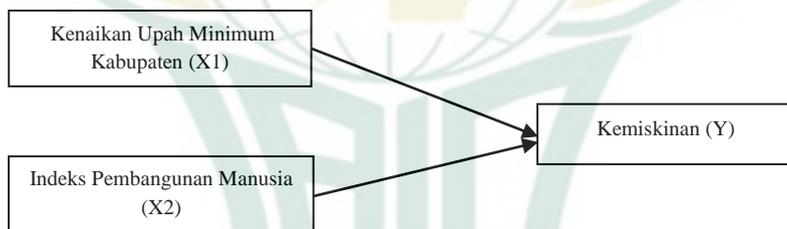
penelitian.			
2	Rizki Febrian Saragih, Purnama Ramadani Silalahi, khairina Tambunan (2022)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007-2021.	Secara parsial, Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka punya pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2007-2021.
<p>Persamaan: Persamaannya dengan penelitian ini terlihat pada penggunaan variabel bebas indeks pembangunan manusia dan variabel terikat kemiskinan. Selain itu terdapat persamaan dalam metode yang digunakan yaitu kuantitatif.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel bebas tingkat pengangguran terbuka kemudian letak perbedaan juga terjadi di lokasi penelitian.</p>			
3	Ria Safitri, Jadzil Baihaqi, Supriyadi (2020)	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pembangunan Manusia Berbasis <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Jumlah kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.	Pembangunan manusia berbasis <i>Maqashid Syariah</i> berpengaruh dan tidak signifikan sedangkan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan kabupaten Grobogan.
<p>Persamaan : Dalam penelitian sama-sama menggunakan variabel bebas upah minimum dan pembangunan manusia, selain itu penelitian ini juga sama menggunakan variabel terikat tentang kemiskinan. Persamaan lainnya juga terlihat dari metode kuantitatif yang digunakan.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dalam penelitian terletak pada variabel pembangunan manusia, dimana tidak menggunakan <i>maqashid syariah</i>. Selain itu penelitian dilaksanakan dilokasi yang berbeda.</p>			

4	Margaretha Larasati Prayoga, Muchtolifah, Sishadiyanti (2021)	Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.	Dalam penelitian ini menghasilkan PDRB, TPT, UMK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, di Kabupaten Sidoarjo Namun, IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
<p>Persamaan : Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel bebas IPM dan UMK. Selain itu penggunaan metode kuantitatif juga menjadi persamaan dalam penelitian ini.</p> <p>Perbedaan : Letak perbedaan terlihat bahwa dalam penelitian ini tidak memakai variabel bebas TPT dan PDRB. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda.</p>			
5	Ni Wayan Linggawati, I. Wayan Wenagama (2022)	Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah terhadap Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem	Tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pengangguran sedangkan tingkat upah memiliki pengaruh positif signifikan pada jumlah pengangguran. Adapun kemiskinan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah.
<p>Persamaan : Persamaan penelitian ini berada pada penggunaan variabel bebas upah serta penggunaan variabel terikat kemiskinan. Dan dalam penelitian ini sama menggunakan metode kuantitatif.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan terlihat pada penggunaan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan, selain itu jumlah pengangguran yang digunakan sebagai variabel terikat.</p>			

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini memiliki dua variabel bebas, berdasarkan data upah minimum kabupaten yang terus mengalami peningkatan, dan hal tersebut yang dianggap sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan melalui kebijakan kenaikan upah minimum, sehingga kenaikan upah memiliki kontribusi dalam mensejahterakan pekerja. Dari uraian tersebut X1 dalam penelitian ini menggunakan data tentang kenaikan upah minimum kabupaten. Selain itu indeks pembangunan manusia yang juga dapat digunakan sebagai kebijakan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga X2 dalam penelitian menggunakan data indeks pembangunan manusia. Adapun X1 dan X2 sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat (Y) yaitu kemiskinan. Berdasarkan dari permasalahan dan teori yang sudah dijelaskan sehingga kerangka berfikir ini dibuat dan dipakai guna mempermudah penelitian yang akan dilaksanakan dan juga untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian yang akan dilaksanakan, seperti:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dijelaskan dengan wujud kalimat pertanyaan. Hipotesis disebut sebagai jawaban sementara, karena jawaban yang disajikan masih dilandaskan pada teori-teori terkait, belum dilandaskan pada fakta nyata yang didapatkan melalui pengumpulan data dan hasil dari penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini terdapat hipotesis sebagai berikut:

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 99-100.

1. Pengaruh Kebijakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2010-2022

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang dipakai oleh para pengusaha atau si pemberi kerja dalam hal pemberian upah pada pekerja. Selain itu Upah minimum kabupaten (UMK) merupakan komponen dari penghasilan karyawan yang bertempat tinggal di suatu kabupaten sehingga tingkat upah merupakan salah satu acuan yang bisa menggambarkan kemakmuran masyarakat. Apabila upah minimum kabupaten mengalami peningkatan maka kebutuhan hidup layak di kabupaten tersebut juga mengalami peningkatan, dan nantinya standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Dari standar hidup layak yang terpenuhi berakibat pada masyarakat yang terbebas dari kemiskinan.³⁵ Menurut Kaufman dalam penelitian Sinta Ariska dkk, menyebutkan tujuan utama diputuskannya kebijakan kenaikan upah minimum adalah demi mencukupi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kemakmuran pekerja. Kenaikan upah minimum adalah kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk berpenghasilan kecil, terutama para pekerja yang kekurangan. Sehingga menaikkan upah minimum nantinya dapat menaikkan penghasilan penduduk, yang kemudian dapat tercipta penduduk yang makmur, sejahtera, dan sentosa sehingga dapat mengentaskan masalah kemiskinan.³⁶

Bersesuaian dengan penjelasan diatas, penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Ria Safitri dkk, tahun 2020 menemukan hasil bahwa upah minimum kabupaten memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Grobogan.³⁷ Penelitian Linggawati dan Wenagama membuktikan terdapat pengaruh signifikan dari peningkatan upah terhadap kemiskinan.³⁸ Moh. Nur Khaqiqi dan Tsalis Syaifuddin dalam

³⁵ I Wayan Yoga Andika dan I Wayan Wenagama, "PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM PROVINSI BALI TAHUN 2015-2019," 4512.

³⁶ Sinta Ariska dan Sri Ulfa Sentosa. "Pengaruh inflasi, pendidikan, dan upah terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia," 85.

³⁷ Ria Safitri, dkk., "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah," *IQTISHODUNA* 16, no. 1 (2020): 54.

³⁸ Ni Wayan Linggawati, dan I. Wayan Wenagama, "Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 4 (2022): 408.

penelitiannya juga membuktikan bahwa kenaikan upah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.³⁹ Dari uraian diatas sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga terdapat pengaruh signifikan pada kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2022.

2. Pengaruh Kebijakan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2010-2022

IPM merupakan salah satu indikator yang bisa diaplikasikan guna mengevaluasi kualitas pembangunan manusia, baik dari segi efeknya terhadap keadaan fisik manusia (kesehatan dan kemakmuran) ataupun dari segi non fisik seperti pengetahuan. IPM tersusun atas tiga dimensi dasar seperti, umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam pelaksanaan pembangunan, IPM dapat digunakan untuk menyumbangkan pedoman dalam penentuan kebijakan mana yang dianggap sebagai prioritas dalam pembangunan yang dapat ditangani terlebih dahulu. Sehingga IPM juga dijadikan alat ukur dalam pembangunan manusia guna menangani permasalahan kemiskinan.⁴⁰ Sesuai dengan itu Todaro dalam Kevin dan Zainal mengungkapkan bahwa pembangunan manusia mempunyai peran guna mewujudkan suatu negara yang kompeten dalam menguasai teknologi modern dan apabila terus dilatih agar terwujud pertumbuhan yang berkelanjutan. Indeks pembangunan manusia yang rendah akan menyebabkan produktivitas masyarakat rendah yang nantinya berimbas pada penghasilan yang didapat. Sehingga penghasilan yang rendah akan mengakibatkan tingkat penduduk miskin yang meningkat.⁴¹

Sejalan dengan uraian diatas, penelitian yang dilaksanakan oleh Margaretha dkk, pada tahun 2021 menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki dampak yang signifikan negatif terhadap angka kemiskinan di Kabupaten

³⁹ Moh Nur Khaqiqi dan Tsalis Syaifudin, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Upah Terhadap Kemiskinan,” *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 32.

⁴⁰ Nadya Agustin, dkk., “Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin,” 55.

⁴¹ Kevin Dwi Prasetyo dan Zainal Arifin. “Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa,” 301.

Sidoarjo.⁴² Penelitian dengan hasil serupa juga dilaksanakan oleh Kevin dan Zainal tahun 2022 yang membuktikan bahwa IPM mempunyai pengaruh yang negatif signifikan pada jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.⁴³ Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan hipotesis seperti:

H2: Diduga terdapat pengaruh signifikan pada kebijakan Indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2010-2021.



⁴² Margaretha Larasati Prayoga, dkk., “Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo,” *Jambura Economic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 136.

⁴³ Kevin Dwi Prasetyo dan Zainal Arifin. “Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa,” 301.